

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat kelas bawah melalui usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro lainnya amat jarang disentuh oleh ilmu ekonomi formal. Padahal selain jumlahnya yang besar, mereka juga kuat dalam menopang perekonomian Indonesia. Selain itu permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah perdesaan. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (Wijoyo, Wiloejo, 2005).

Peran lembaga keuangan mikro dalam perekonomian suatu negara sangat penting karena lembaga keuangan lainnya merupakan media intermediasi dalam sistem keuangan. Sistem intermediasi tidak akan terlaksana tanpa adanya sistem keuangan. Dengan adanya sistem keuangan yang baik maka diharapkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan semakin membaik terutama masyarakat miskin di wilayah perdesaan.

Untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga keuangan yang menjadi intermediasi maka pengelola dalam hal ini bank atau lembaga keuangan harus terus meningkatkan manajemennya sebagai upaya

peningkatan pelayanan terhadap para pengguna lembaga keuangan.

Pesatnya peran lembaga keuangan dan terjadinya berbagai perubahan kebijakan dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 2007 diluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang fungsi utamanya adalah pengentasan kemiskinan diwilayah perdesaan melalui sektor ekonomi.

PNPM Mandiri Perdesaan menjadi lembaga keuangan mikro dan intermediasi di sebuah desa, unit pengelola kegiatan simpan pinjam perempuan (UPK-SPP) Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya serta evaluasi. Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan merupakan salah satu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Kondisi UPK saat ini dan perkembangannya sangat menentukan keberlanjutan UPK sebagai salah satu lembaga kredit mikro informal di Indonesia.

Untuk itu maka diperlukan pengelolaan manajemen yang baik setiap Unit Pengelola Kegiatan simpan pinjam perempuan sehingga unit pengelola kegiatan simpan pinjam perempuan dapat melayani pemberian kredit kepada masyarakat miskin dalam hal ini Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat.

Dibawah ini merupakan tabel beban operasional pendapatan operasional yang akan mencerminkan bagaimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan dalam pengelolaan dana secara efisien atau tidak.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diamati perkembangan BOPO pada Simpan Pinjam Perempuan PNM Mandiri Perdesaan Oktober tahun 2011-September 2013 mengalami Kenaikan dengan rata-rata BOPO 13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja UPK- Simpan Pinjam Perempuan perlu ditekan laju kenaikan BOPO karena jika tidak berarti cukup banyak biaya yang dikeluarkan oleh UPK Simpan Pinjam Perempuan dalam pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, Melihat tingkat BOPO pada UPK- Simpan Pinjam Perempuan di kabupaten sidoarjo yang setiap tahunnya mengalami peningkatan perlu diteliti dan dapat menjadi sebagai suatu masalah, Apa saja yang mempengaruhi kenaikan BOPO pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di kabupaten sidoarjo.

Posisi beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) pada masing-masing kecamatan secara rata-rata Tarik dan Wonoayu memiliki nilai BOPO yang sama yakni sebesar 15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi UPK dikecamatan Tarik dan Wonoayu paling rendah jika ditinjau dari biaya operasional yang dikeluarkan paling besar dibandingkan dengan UPK yang ada dikecamatan Jabon.

Sebaliknya Unit Pengelola Kegiatan SPP dikecamatan Jabon memiliki nilai beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) terendah yakni sebesar 11% persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Unit Pengelola Kegiatan SPP dikecamatan Jabon paling tinggi ditinjau dari biaya operasional yang dikeluarkan paling kecil dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya.

Tabel 1.1
POSISI BIAYA OPERASIONAL DAN PENDAPATAN OPERASIONAL
UNIT PENGELOLA KEGIATAN-SPP KABUPATEN SIDOARJO
PERIODE OKTOBER 2011 – SEPTEMBER 2013
(dalam prosentase)

TAHUN	BULAN	Kecamatan Jabon	Trend	Kecamatan Tarik	Trend	Kecamatan Wonoayu	Trend	
2011	OKTOBER	6,00		9,00		15,00		
	NOVEMBER	6,00	0,00	9,00	0,00	14,00	-1,00	
	DESEMBER	6,00	0,00	9,00	0,00	14,00	0,00	
2012	JANUARI	11,00	5,00	15,00	6,00	24,00	10,00	
	FEBRUARI	11,00	0,00	15,00	0,00	24,00	0,00	
	MARET	12,00	1,00	16,00	1,00	23,00	-1,00	
	APRIL	12,00	0,00	16,00	0,00	18,00	-5,00	
	MEI	12,00	0,00	16,00	0,00	21,00	3,00	
	JUNI	11,00	-1,00	16,00	0,00	19,00	-2,00	
	JULI	11,00	0,00	15,00	-1,00	18,00	-1,00	
	AGUSTUS	11,00	0,00	15,00	0,00	17,00	-1,00	
	SEPTEMBER	11,00	0,00	15,00	0,00	16,00	-1,00	
	OKTOBER	11,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	
	NOVEMBER	11,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
	DESEMBER	11,00	0,00	15,00	0,00	14,00	-1,00	
2013	JANUARI	14,00	3,00	15,00	0,00	11,00	-3,00	
	FEBRUARI	12,00	-2,00	16,00	1,00	12,00	1,00	
	MARET	12,00	0,00	15,00	-1,00	10,00	-2,00	
	APRIL	11,00	-1,00	15,00	0,00	10,00	0,00	
	MEI	11,00	0,00	16,00	1,00	10,00	0,00	
	JUNI	12,00	1,00	15,00	-1,00	10,00	0,00	
	JULI	12,00	0,00	15,00	0,00	10,00	0,00	
	AGUSTUS	12,00	0,00	15,00	0,00	10,00	0,00	
SEPTEMBER	11,00	-1,00	14,00	-1,00	10,00	0,00		
Rata-rata			5,00		5,00		-0,22	
Total rata-rata Bopo							13	
Total rata-rata Trend							3,00	

Sumber : UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kab.Sidoarjo, data diolah

Untuk mengukur kemampuan suatu lembaga kredit mikro dalam hal ini UPK Simpan Pinjam Perempuan dalam melakukan kegiatan operasionalnya apakah sudah efisien maka dapat menggunakan analisis kinerja keuangan yaitu Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Kemampuan sebuah lembaga keuangan dalam menghasilkan pengelolaan yang efisien dapat diukur menggunakan rasio-rasio pengukuran

efisiensi yang harus memperhatikan aspek–aspek yang berpengaruh diantaranya rasio likuiditas, rentabilitas, kualitas aktiva, jumlah ksm, dan efisiensi.

Likuiditas dalam dunia perbankan merupakan alat untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Hal ini juga berlaku pada lembaga keuangan mikro seperti pada PNPM Mandiri. Akan tetapi ada beberapa rasio yang tidak bisa dipakai dalam PNPM Mandiri. Alat ukur yang dapat digunakan adalah *Loan to Asset Rasio* (LAR) merupakan kemampuan Unit Pengelola Kegiatan untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki lembaga keuangan. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai kredit makin besar, sehingga pengaruh LAR terhadap BOPO adalah positif.

Kualitas aktiva adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya (Lukman Dendawijaya, 2009 : 61). Pada umumnya PNPM Mandiri dengan tugasnya sebagai penyaluran kreditnya bisa diukur menggunakan rasio ini. Akan tetapi tidak semua alat ukur dapat digunakan dalam rasio kualitas aktiva pada PNPM Mandiri. Alat ukur yang dapat digunakan adalah *Non Performing Loan* (NPL) dan *Portofolio At Risk* (PAR).

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja fungsi lembaga keuangan. Bank Indonesia sebagai bank sentra yang memiliki kewenangan melalui peraturan bank indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5 persen.

Dalam Modul Pinjaman Bergulir (2012:36) *Portofolio At Risk* (PAR) menunjukkan jumlah KSM yang beresiko hilang atau menunggak lebih dari tiga bulan. PAR akan berpengaruh negatif terhadap BOPO, karena ketika PAR mengalami peningkatan maka *Beban Operasional* akan meningkat dan *Pendapatan Operasional* menurun sehingga (BOPO) akan menjadi naik, maka pengaruh NPL dan PAR terhadap BOPO adalah Positif.

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.

Unit Pengelola Kegiatan (SPP) merupakan Unit yang mengelola operasional kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam yang sudah memiliki usaha program ini digunakan untuk meningkatkan usaha bahkan untuk pengembangan usaha. Jumlah KSM menurut Modul Pinjaman Bergulir (2012;38) merupakan jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pinjaman.

Fasilitator Kecamatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan merupakan juru kunci keberhasilan program PNPM mandiri Perdesaan, penyebaran informasi, pemberdayaan sumber daya manusia ditingkat desa dan kecamatan.

Untuk mengukur apakah Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) efektif dan efisien dalam kegiatan operasional (PNPM-MP) dapat dihitung dengan perbandingan antara *Beban Operasional* dengan

Pendapatan Operasional . Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik jika BOPO rendah berarti semakin efisien karena menunjukkan efektifitas manajemen di unit pengelola kegiatan simpan pinjam perempuan dalam menggunakan biaya operasional, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan juga akan besar. Hal ini menunjukkan program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah penyebab peningkatan BOPO pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sehingga peneliti mengambil Judul **“PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, JUMLAH KELOMPOK DAN FASILITATOR KECAMATAN TERHADAP BOPO PADA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PNPM- MANDIRI DIKABUPATEN SIDOARJO”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah LAR, NPL, PAR, Jumlah KSM dan Fasilitator Kecamatan, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri diKabupaten Sidoarjo?
2. Apakah LAR secara Individu memiliki pengaruh Positif yang signifikan terhadap BOPO pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kabupaten Sidoarjo?

3. Apakah NPL secara Individu memiliki pengaruh Positif terhadap BOPO pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan diKabupaten Sidoarjo?
4. Apakah PAR secara Individu memiliki pengaruh Positif terhadap BOPO pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan diKabupaten Sidoarjo?
5. Apakah Jumlah KSM secara Individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BOPO pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM mandiri Perdesaan diKabupaten Sidoarjo?
6. Apakah Fasilitator Kecamatan secara Individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BOPO pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM mandiri perdesaan diKabupaten Sidoarjo?
7. Diantara LAR, NPL, PAR, Jumlah KSM dan Fasilitator Kecamatan, manakah yang memiliki kontribusi yang dominan terhadap BOPO yang diperoleh pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh LAR, NPL, PAR, Jumlah KSM dan Fasilitator Kecamatan secara bersama-sama terhadap BOPO pada kegiatan Simpan pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kabupaten Sidoarjo

2. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh Positif LAR secara individu terhadap BOPO pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM Mandiri Kabupaten Sidoarjo.
3. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh Positif Variabel NPL secara individu terhadap BOPO pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM Mandiri di Kabupaten Sidoarjo.
4. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh Positif PAR secara individu terhadap BOPO pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM Mandiri di Kabupaten Sidoarjo
5. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh Jumlah KSM secara individu terhadap BOPO pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM Mandiri di Kabupaten Sidoarjo.
6. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh Fasilitator Kecamatan secara individu terhadap BOPO pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM Mandiri di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah berikut :

1. Bagi UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

Bagi UPK, dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi tambahan dalam pengambilan keputusan pengelolaan pelaksanaan kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sidoarjo pada masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Bagi penulis, digunakan untuk mengimplementasikan teori perkuliahan yang

diperoleh serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai PNPM Mandiri dalam menentukan kebijaksanaan yang dapat mempengaruhi perkembangan program pemerintah khususnya dalam hal pengelolaan kegiatan SPP yang lebih efisien.

3. Bagi STIE Perbanas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan penambahan perbendaharaan koleksi perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan atau acuan bagi semua mahasiswa yang akan mengambil judul yang sama untuk bahan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang antara bab satu dengan bab yang lain saling berhubungan. Sistematika uraiannya sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini secara garis besar menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan landasan teori dan kerangka pemikiran yang menggambarkan bagaimana alur hubungan variabel yang akan diteliti, serta hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini secara garis besar diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan

pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data, dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menyajikan mengenai temuan data penelitian serta deskripsinya, kemudian analisis data serta interpretasi hasil analisis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk berbagai pihak.